



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. R.E. Martadinata No. 9 Telp. (0414) 22587 Benteng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 013 / I / TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Membantu PPK dalam kegiatan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 12 Januari 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 12 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

^

Drs. SUARDI, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020



Tembusan :

1. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kabag. Pembangunan Setda di Benteng

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 013 / I / TAHUN 2026
 TENTANG
 TETANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAAN	(NAMA/NIP)	ANGGARAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANDI NASLIYANTO L., S.H. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 2.500.000	PPTK
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	ANDI NASLIYANTO L., S.H. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 1.875.000	PPTK
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	ANDI NASLIYANTO L., S.H. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 1.375.000	PPTK
4	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	ANDI NASLIYANTO L., S.H. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 1.875.000	PPTK
5	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	ANDI NASLIYANTO L., S.H. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 1.375.000	PPTK
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANDI NASLIYANTO L., S.H. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 2.500.000	PPTK
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MUH. THAMRIN, S.E. NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 4.150.131.500	PPTK
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	MUH. THAMRIN, S.E. NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 2.500.000	PPTK
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	MUH. THAMRIN, S.E. NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 2.500.000	PPTK
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MUH. THAMRIN, S.E. NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 50.000.000	PPTK
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DEWI ANRIANI, S.Si. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 10.245.400	PPTK
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DEWI ANRIANI, S.Si. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 5.913.800	PPTK
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DEWI ANRIANI, S.Si. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 9.900.000	PPTK
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANDI NASLIYANTO L., S.H. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 76.228.000	PPTK
D	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MUH. THAMRIN, S.E. NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 99.990.000	PPTK
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DEWI ANRIANI, S.Si. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 760.168.800	PPTK
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	MUH. THAMRIN, S.E. NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 38.630.000	PPTK



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAAN	(NAMA/NIP)	ANGGARAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MUH. THAMRIN, S.E. NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 159.480.000	PPTK
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MUH. THAMRIN, S.E. NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 1.340.000	PPTK
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MUH. THAMRIN, S.E. NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 10.000.000	PPTK
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
A	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	SUDIRMAN, S.E. NIP. 19720712 200701 1 039	Rp 1.019.320.000	PPTK
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	SUDIRMAN, S.E. NIP. 19720712 200701 1 039	Rp 100.000.000	PPTK
B	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Ir. FATRECIA IMELDA, M.M NIP. 19730203 201001 2 002	Rp 20.100.000	PPTK
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
A	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUDIRMAN, S.E. NIP. 19720712 200701 1 039	Rp 262.530.000	PPTK
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUDIRMAN, S.E. NIP. 19720712 200701 1 039	Rp 200.000.000	PPTK
3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan pembangunan dan Pngioperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUDIRMAN, S.E. NIP. 19720712 200701 1 039	Rp 20.000.000	PPTK
4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	SYAMSUL QADRI, S.M. NIP. 19770918 200801 1 013	Rp 195.110.000	PPTK
B	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUDIRMAN, S.E. NIP. 19720712 200701 1 039	Rp 600.000.000	PPTK

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

#

Drs. SUARDI, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670705 199403 1 020

